



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DHARNI HARYATI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **155087**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 753.987.000

1. Tanah Seluas 60 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 61.800.000
2. Tanah Seluas 350 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 112.000.000
3. Tanah Seluas 246 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 31.744.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/24 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/140 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 312.768.000
6. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 76.800.000
7. Tanah Seluas 259 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 25.875.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/37 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 103.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 295.294.000

1. MOTOR, SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000



3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.
268.294.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	335.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	396.129.947
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.780.410.947
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.780.410.947

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.